

DOKTRIN ETIKA POLITIK TERHADAP LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MAJID

The Doctrine Of Political Ethics Towards State Institutions In Indonesia According To The Views Of Nurcholish Majid

Muh. Iqbal Pratama ¹**Aslim Chalid ^{1*}****Kurniati ²**¹Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar²Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar³Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassaremail: ¹10200122041@uin-alauddin.ac.id, ²10200122059@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id**Kata Kunci**Etika Politik
Nurcholish Majid
Lembaga Negara**Keywords:**Political ethics
Nurcholish Majid
State Institution**Received:** March, 2024**Accepted:** March, 2024**Published:** March, 2024**Abstrak**

Permasalahan pokok dalam lembaga negara yang mungkin saat ini terjadi adalah kurangnya kesadaran dari para pejabat negara mengenai pentingnya penerapan etika politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berkaitan dengan doktrin etika politik menurut Nurcholish Majid, menurut beliau etika politik ini berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas yang tinggi, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Nurcholish Majid menekankan pentingnya integritas moral bagi para pemimpin dan pejabat negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu mencari beberapa referensi mengenai "Doktrin Etika Politik terhadap Lembaga Negara di Indonesia Menurut Pandangan Nurcholish Majid". Dengan ini mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka juga harus berkomitmen pada kepentingan rakyat dan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga negara juga harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Doktrin etika politik Nurcholish Majid menawarkan kerangka berpikir yang ideal bagi lembaga negara di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga negara dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, akuntabel, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Saran ke masyarakat agar bisa turut serta dalam mengawasi dan bisa memberi masukan terhadap kinerja dari pejabat negara yang ada didalam Lembaga Negara itu sendiri.

Abstract

The main problem in state institutions that may currently occur is the lack of awareness of state officials regarding the importance of applying political ethics in carrying out their duties and authorities. Regarding the doctrine of political ethics according to Nurcholish Majid, according to him, this political ethics is based on religious values and high morality, and upholds the principles of democracy, justice, and people's welfare. Nurcholish Majid emphasizes the importance of moral integrity for leaders and state officials. This research uses a qualitative approach with a literature study method, namely looking for several references regarding the "Doctrine of Political Ethics to State Institutions in Indonesia According to Nurcholish Majid's View". With this they must uphold the values of honesty, trustworthiness and justice in carrying out their duties. In addition, they must also be committed to the interests of the people and free from corruption and abuse of power. State institutions must also play an active role in realizing social justice and people's welfare. This can be done by formulating and implementing pro-people policies, strengthening the legal and judicial systems, as well as improving people's access to education and so on. Nurcholish Majid's doctrine of political ethics offers an ideal framework for state institutions in Indonesia. By applying these principles, state institutions can carry out their functions more effectively and accountably, and realize the ideals of national independence. As well as advice to the public so that they can participate in monitoring and can provide input on the performance of state officials within the State Institution itself.

PENDAHULUAN

Etika politik merupakan suatu hal yang mungkin bisa dikatakan sangat penting dalam dunia politik ataupun dalam dunia sosial. Doktrin etika politik dalam lembaga negara ini merupakan suatu hal yang jika etika politik ini diterapkan dalam suatu lembaga negara akan memungkinkan mengarah pada suatu lembaga negara yang para pejabatnya bermoral yang nantinya akan mengarah pada suatu lembaga negara yang bukan hanya bisa memberi manfaat ke negara saja tetapi ini juga bisa memberi manfaat besar terhadap masyarakat. Alasan mengapa tema ini diangkat karena bisa dikatakan Etika politik memiliki peran penting dalam perpolitikan karena etika politik ini menjadi pembibing perilaku serta dalam hal menentukan Keputusan-keputusan politik yang diambil oleh perseorangan, pemimpin ataupun Lembaga-lembaga yang didalamnya mengandung unsur perpolitikan.

Jika dilihat dari sisi pengartiannya, etika politik ini merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang didalamnya mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral atau etika yang berkaitan dengan tindakan politik, dalam mengambil Keputusan, serta dalam hal perilaku politik. Prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam etika politik ini melibatkan penerapan konsep moral, seperti konsep kebebasan, tanggung jawab, keadilan, serta kesetaraan dalam rana institusi atau Lembaga politik dan proses dalam politik.

Dalam kaitanya dengan etika politik menurut pandangan Nurcholish Majid, beliau menawarkan etika politik yang didalamnya memuat beberapa prinsip dasar, yaitu keadilan, demokrasi dan keterbukaan serta kesejahteraan sosial, menurut beliau etika politik ini harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Indonesia (Pancasila/UUD NRI 1945)¹. Dari beberapa hal-hal yang ditawarkan beliau, dalam kaitanya dengan lembaga negara ini bisa memberikan pengaruh terhadap penanaman moral/etika dalam berjalan kewangannya. Dalam etika politik islam Nurcholish Majid mengkaji naskah daripada perjanjian Madinah (Piagam Madinah) yang dimana piagam madinah ini menjadi sumber utama etika politik pada masa Rasulullah², Nurcholish majid sendiri dalam penerapan etika politik beliau tidak pernah melenceng dari nilai-nilai konstitusi. Dari hal ini bisa kita lihat bahwasanya Nurcholish Majid dalam hal etika politik beliau menitik beratkan pentingnya penerapan nilai-nilai dari konstitusi negara, karena pada masa Rasulullah, beliau juga menjadikan konstitusi negaranya yaitu Piagam Madinah sebagai salah satu sumber etika dalam politik Islam. Etika politik didalamnya juga mempertimbangkan atara hubungan kekuasaan dan tanggung jawab, serta peran dalam mempengaruhi kehidupan sosial dan politik. Fungsi tujuan utama daripada etika politik ini ialah untuk mengarahkan para politisi agar dalam berperilaku (bertidak) ataupun dalam mengambil keputusan

¹ Ahmad Tafsir, *Posisi Nurcholish Madjid Dalam Pembangunan Pemikiran Islam Di Indonesia*, Dalam Jalaluddin Rahmat, ed. by Thariqat Nurcholisshy, Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 74.

² Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Nurcholish Majid Dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju), h. 98.

politik senantiasa mengarah pada prinsip keadilan, hak asasi manusia (HAM), serta mampu memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat secara menyeluruh³.

Jika kita lihat keberadaan lembaga negara yang ada di Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya masih banyak pejabat negara yang belum menanamkan dan memperhatikan yang namanya etika dalam berpolitik baik itu pada pengambilan keputusan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan menjalankan kewenangannya dalam lembaga negara. Oleh karena itu doktrin etika politik yang dilakukan terhadap lembaga negara, ini nantinya jika ditanamkan dengan sepenuh hati maka itu akan memberi dampak yang signifikan terhadap segala hal yang mereka lakukan dalam lembaga negara tersebut.

Dalam kasus-kasus yang spesifik di Indonesia, etika politik bisa mempengaruhi bagaimana Keputusan serta tindakan dari Lembaga negara yang Dimana melalui doktrin etika politik kita dapat lebih dalam memahami bagaimana seharusnya Lembaga negara itu menjalankan kewenangannya berdasarkan konteks etika dan moral, serta etika politik ini juga bisa saja menjadi sarana dalam mencapai suatu keadilan dan kestabilan politik.

Dengan demikian, tujuan utama daripada tema yang diangkat dalam materi ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal tentang peran dan pengaruh dari etika politik dalam Lembaga negara, bagaimana peran etika politik dalam praktik-praktik politik yang mengarah pada urusan administrasi negara untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat untuk rakyat (Masyarakat).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan suatu pengkajian pustaka yang mengadopsi paradigma empiris yang cermat. Studi kepustakaan dijalankan sebagai instrumen analisis yang mendalam, mengkaji literatur dan laporan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Fokus utama dari penelitian ini, yaitu pada doktrin etika politik yang ditujukan pada lembaga negara di Indonesia sesuai dengan pandangan Nurcholish Majid. Dengan menekankan bagaimana konsep etika politik yang dipaparkan oleh Nurcholish Majid, yang pada intinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahan kepada seluruh lembaga negara (pejabat negara) mengenai bagaimana pentingnya penanaman etika politik serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih lanjut tentang bagaimana pandangan Nurcholish Majid dapat berpengaruh terhadap lembaga negara di Indonesia.

³ Runi Hariantati, 'Etika Politik Dalam Lingkup Negara Demokrasi', *DEMOKRASI*, Vol. 2 No. 1 (2003). h. 42.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar Nurcholish Majid

1. Sejarah hidup dan kontribusi Nurcholish Majid terhadap etika politik

Nurcholish Majid atau dikenal dengan sebutan Cak Nur, beliau lahir pada 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Dalam hal Pendidikan cak nur pernah menempuh proses Pendidikan daari dua sekolah dasar (SD), yaitu pada pagi hari Cak nur melakukan proses belajarnya di Sekolah rakyat (SR) di Majoanyar, Jombang, lalu pada sore harinya ca knur melanjutkannya di madrasah al-Wathaniyah yang Dimana madrasah ini merupakan madrasah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri⁴.

Berselang dari dunia Pendidikan SD, SMP dan SMA, Cak nur melanjutkan studinya di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat lebih tepatnya di Universitas Chicago, yang pada akhirnya beliau meraih gelar doktorat pada studi islam. Dalam proses belajarnya di Amerika, beliau berada dibawah bimbingan seorang pakar Pakistan-Amerika (Fazlur Rahman)⁵.

Beralih dari hal tersebut Cak Nur pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina di Jakarta pada yakni dari tahun 1998 hingga kematian beliau. Beliau merupakan seorang intelektual muslim Indonesia yang bisa dikatakan memiliki peran penting dalam Masyarakat Indonesia.

Dalam kontribusinya untuk dunia politik pada tahun 2003, Cak Nur berpartisipasi dalam pemilihan presiden di Indonesia. Gagasan dan kontribusi dari beliau dikenal sebagai pendukung dari modernisasi dalam islam, dalam hal modernisasi ini yang didalamnya mencakup berupa pemahaman mengenai etika dalam berpolitik. Beliau berpendapat bahwa islam dapat diakui serta diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam hal politik, beliau menekankan pentingnya toleransi, demokrasi, serta pluralisme dalam konteks ide-ide global, yang dimana ini menjadi prinsip-prinsip utama beliau dalam hal etika politik islam⁶.

2. Pandangan utama Nurcholish Majid tentang etika politik

Jika kita melakukan penalaran dari sudut pandang dunia yang semakin kompleks serta dinamis, bisa dikatakan etika politik ini sudah menjadi aspek yang tidak bisa kita abaikan. Nurcholish majid merupakan seorang tokoh penting dalam Masyarakat Indonesia, beliau memiliki pandangan yang unik serta inovatif mengenai etika politik. Beliau berpendapat bahwa islam dapat diakui dan diterapkan dalam konteks atau segi modern, termasuk dalam bidang politik, dan menitikberatkan pentingnya integrasi nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Dari hal diatas kita bisa melihat bahwa dalam dunia politik khususnya dalam bidang etika politik Nurcholish Majid menjadikan prinsip serta nilai-nilai pancasila (demokrasi dan keadilan sosial) sebagai landasan atau pijakan dalam etika politik, oleh karena itu berikut ini ada beberapa pandangan utama nurcholish majid mengenai hal etika politik:

- a. Integrasi islam dengan demokrasi, artinya dalam hal tersebut islam bisa diakui serta diterapkan

⁴ Rosdiana, 'FILOSOFIS PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID DALAM HAL HUBUNGAN AGAMA (ISLAM) DAN NEGARA', PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 03 No. 01 (2022) <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas>.

⁵ M Munawar, 'Relevansi Dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Indonesia', *JURNAL: Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, (2019). h. 332-349.

⁶ S MA Fauzi Sos, *Politik Islam Pandangan Nurcholish Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Intelektual Islam Indonesia*, Cet. I; (Kabupaten Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN, 2022).

dalam konteks modern, termasuk dalam bidang politik. Beliau menekankan bahwa integrasi dari nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan social. Hal ini mencakup penerapan hak serta kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi, serta bagaimana islam bisa diterapkan kedalam konteks politik modern⁷.

- b. Toleransi dan pluralisme, dalam hal ini Nurcholish Majid berpendapat bahwa toleransi ini bisa menjadi hal yang sangat penting, karena bisa kita lihat keadaan dari negara Indonesia yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam keragaman, oleh karena itu penting untuk Saling menghargai dan saling menghormati tentang perbedaan baik itu dari hal agama, budaya, dan ideologi.
- c. Pendidikan dan Pembangunan etika politik, dalam hal ini nurcholish majid sangat mendukung akan hal tersebut, karena menurutnya Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan sosial, akan menciptakan generasi yang memahami dan menanamkan etika politik yang berlandaskan pada nilai-nilai islam.

Pandangan dari nurcholish majid mengenai etika politik, ini mencakup tentang hal integrasi islam dengan demokrasi, pluralisme, Pendidikan serta pengembangan etika politik. Dari hal tersebut beliau berusaha agar bisa menciptakan pemahaman yang lebih baik dan matang mengenai hal bagaimana islam dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan social dalam konteks politik, serta bisa mendorong para generasi muda untuk memahami dan menerapkan etika politik yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

B. Doktrin Etika Politik di Indonesia

1. Pengertian etika politik

Etika politik kata dasarnya berasal dari dua kata yaitu etika dan politik, istilah etika berasal dari Bahasa Yunani kuno (ethos)⁸ yang memiliki banyak arti, yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika, yang oleh Aristoteles filosof besar Yunani, sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral⁹. Etika merupakan suatu yang baik dan yang buruk dan juga tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak;

- a. Etika merupakan sekumpulan asas atau nilai yang dengan kewajiban moral seseorang;
- b. Etika adalah suatu yang dianut mengenai benar atau salah dalam suatu golongan atau kelompok maupun Masyarakat.

Dari dua makna etika diatas, bisa dikatakan bahwa etika merupakan suatu hal yang didalamnya mengandung suatu Tindakan atau perilaku yang mengarah kepada hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, yang secara tidak sengaja ataupun sengaja dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok masyarakat. Etika ini juga bisa dimaknai suatu asas ataupun nilai yang dalam pengimplementasian-nya berkenaan kepada suatu kewajiban (moral dan akhlak).

Etika ini juga bukan hanya mengarah kepada hal yang berkaitan dengan ajaran moral saja, tetapi etika ini juga merupakan suatu filsafat atau pemikiran kritis yang mendasar pada pendekatan moral¹⁰. Etika

⁷ M.MUAMAR, 'PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA', 2007.

⁸ Rahmad Tri Hadi, 'ETIKA POLITIK ARISTOTELES: Kohesivitas Etika Dan Politik', *AL-AQIDAH*, Vol. 13 No. 2, (2021). h. 202.

⁹ Muh. In'amuzzahidin, 'ETIKA POLITIK DALAM ISLAM', *JURNAL: Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2 (2015), h. 90-94.

¹⁰ M Thahir Maloko, 'ETIKA POLITIK DALAM ISLAM', *JURNAL: Al-Daulah*, Vol. 1 No. 2 (2013). h. 52.

adalah sebuah ilmu atau bisa juga dikatakan sebagai suatu kesadaran seorang individu dalam melakukan sesuatu atau ketika bertindak.

Dari pendapat yang diuraikan diatas bisa kita fahami bahwa etika itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan juga sebagai suatu pemikiran kritis bukan hanya berkaitan dengan moral saja. Etika dalam arti pemikiran yang kritis ini merupakan suatu proses pemikiran atau pengkajian suatu hal tertentu baik itu bersifat khusus maupun bersifat umum yang dilandasi atau berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam etika itu sendiri (mengarah kepada hal-hal yang baik atau positif)¹¹.

Etika ini juga merupakan suatu teori yang muncul akibat kesadaran orang-orang mengenai adanya suatu peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang bersifat anarkis, yang dimana peristiwa ini terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai antar sesama yang terjadi diberbagai tingkatan seperti dalam Tingkat individu, kelompok, ataupun ini juga bisa saja terjadi dalam ranah yang lebih luas. Oleh sebab itu etika ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan, baik itu dalam Masyarakat maupun negara.

Beralih dari pendefinisian etika selanjutnya yaitu definisi dari kata kedua yaitu, politik. Politik merupakan suatu kata yang kata dasarnya berasal dari istilah Yunani kuno "polis" yang memiliki makna negara kota, dengan politik ini berarti ada hubungan antara manusia yang hidup Bersama yang didalam hubungan itu timbul suatu aturan, kewenangan, yang akhirnya melahirkan kekuasaan¹².

Menurut para ahli, seperti Dr. Wirjono Projodikoro, beliau mengungkapkan bahwa dalam bidang politik ada suatu sifat penting yang melekat didalamnya, yaitu penggunaan kekuasaan yang digunakan oleh suatu kelompok Masyarakat kepada golongan lain, yang pada intinya selalu ada kekuasaan didalamnya.

Kata politik memiliki makna yang sangat luas tetapi yang sering digunakan sebagai maknanya adalah politik yang bermakna kekuasaan, jadi politik ini merupakan suatu kekuasaan yang melekat pada diri setiap insan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam suatu negara baik itu dalam system ketatanegaraan, tindakan pemerintah dan lain sebagainya. Dengan demikian, politik ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan yakni dalam proses pembuatan Keputusan serta kebijakan publik¹³.

Jika kita melihat kata politik dari sisi pemaknaan kekuasaan maka kata politik juga bisa kita artikan sebagai sesuatu hal yang mengatur ataupun mengurus suatu perkara (permasalahan), mengapa bisa dikatakan demikian karena kekuasaan itu merupakan suatu hal Dimana seseorang yang memiliki kekuasaan tersebut mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus apapun yang berada di bawah rana kekuasaannya.

Sementara itu doktrin jika dikaitkan dengan hal etika politik maka kedua hal ini bisa menjadi suatu yang sangat berpengaruh dalam hal politik. Karena pada dasarnya jika kita melihat dari pendefinisian kata doktrin yang dimana kata ini berarti sebagai suatu kebenaran dan bisa juga diartikan sebagai sistem

¹¹ Eko Handoyo and others, *ETIKA POLITIK*, Cet. II; (Semarang: Widya Karya Press, 2016), h. 1-4.

¹² Hamdani, 'ARTIKULASI POLITIK DAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK (Dalam Perspektif Fiqhu Al-Siyâsah)', *JURNAL: RISALAH HUKUM*, Vol. 3 (2007), h. 64.

¹³ Yohana Oktaviani Lavan and others, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA (IMPLEMENTATION OF ISLAMIC VALUES IN INDONESIAN POLITICAL DYNAMICS)', *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 09, No. 01, (2021), h. 56-66.

kebenaran (system of truth)¹⁴. Dengan demikian, doktrin ini berarti suatu hal yang didalamnya berisi tentang ajaran kebenaran. Maka, kembali lagi jika kita kaitkan dengan etika politik maka Doktrin etika politik ini merupakan suatu hal yang didalamnya terdapat ajaran kebenaran yaitu dalam hal etika (moral) yang mencerminkan sikap keadilan, kejujuran serta pertanggungjawaban dalam menjalankan berbagai macam hal yang erat kaitannya dengan dunia politik. Yang dimana setiap lembaga negara yang bergelut di dunia politik sudah semestinya menerapkan hal ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Konsep Etika Politik

Dalam hal konsep etika politik biasanya ini merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana cara berperilaku baik itu individu atau kelompok dalam konteks politik. Etika politik ini mencakup suatu pemahaman mengenai apa yang dianggap baik ataupun buruk dalam hal politik, serta tentang hak dan kewajiban moral setiap individu maupun kelompok dalam berhubungan dengan bidang politik¹⁵.

Konsep etika politik didalamnya mencakup suatu hal yang di anggap baik dan buruk yang Dimana itu meliputi beberapa hal, yaitu mencakup keadilan, kejujuran, integritas dan pertanggungjawaban. Sedangkan hal-hal yang dianggap buruk termasuk, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan ketidakadilan dari berbagai pihak¹⁶.

Sementara itu dalam hal hak dan kewajiban moral setiap individu maupun antar kelompok dalam berhubungan dengan bidang politik, ini juga mencakup beberapa hal, seperti kebebasan untuk menyalurkan pendapat, hak untuk ikut serta dalam proses politik, dan hak untuk hidup dalam ruang lingkup politik yang bersih dan transparan. Sedangkan yang termasuk dalam hal kewajiban, seperti mematuhi aturan, menghargai hak-hak individu lain, berperilaku adil terhadap orang lain, serta ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Hubungan antara etika dan politik merupakan suatu hubungan yang sangat kompleks, etika dan politik memiliki hubungan yang erat karena keduanya mencakup dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pertimbangan tentang bagaimana individu harus bertindak serta bagaimana masyarakat harus diatur, sehingga etika dan politik memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan negara¹⁷.

Jika dilihat dari segi pembentukan hukum islam, etika politik ini bisa dikatakan memiliki hubungan atau keterkaitan dalam pembentukan hukum atau kebijakan tersebut¹⁸. Karena dapat kita ketahui bahwa dalam hukum islam itu didalamnya tidak bisa kita pungkiri bahwa ada suatu konsep yang dinamakan Maqasid al-syari'ah yang dimana hal ini berkaitan dengan tujuan dari syari'ah. Tujuan utama dari syari'ah (hukum islam) yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum islam etika politik ini haruslah berpatokan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai seperti keadilan,

¹⁴ Deden Sumpena, 'PARADIGMA PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM', *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 12, (2008). h. 223.

¹⁵ Sudarno Shobron, 'Konsep Etika Berpolitik Menurut Kitab Sunan Abu Dawud', *JURNAL: Lektur Keagamaan*, Vol. 11. No. 1 (2013), h. 151–180.

¹⁶ Eka Zuliana, *KONSEP ETIKA POLITIK DALAM PEMAHAMAN AGAMA*.

¹⁷ Sri Pujiningsih, 'Hubungan atau keterkaitan Antara Hukum Dan Etika Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Membaca Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Sumber Etik)', *Pena Justitia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 1, (2017), h. 30–36.

¹⁸ Marilang, Kurniati, Hasan Hamsah, 'Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 14.No. 2 (2021), h. 122–136, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>.

transparansi, kemaslahatan umat manusia dan lain sebagainya.

3. Penerapan dan pengembangan doktrin etika politik di Indonesia

Penerapan etika politik di Indonesia merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sangat kompleks dan merupakan suatu hal yang memiliki perkembangan yang pesat. Ada beberapa aspek yang sangat relevan dalam hubungannya dengan penerapan konteks etika politik di Indonesia, seperti transparansi dan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, dan lain sebagainya¹⁹.

- a. Transparansi dan akuntabilitas, jika dikaitkan dengan etika politik transparansi dan akuntabilitas ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja setiap individu atau kelompok dalam proses pengambilan Keputusan dan berbagai macam hal lainnya.
- b. Pemberantasan korupsi, dalam dunia politik tidak bisa dipungkiri akan terjadinya suatu perilaku yang tidak di inginkan (korupsi), maka dari itu penerapan etika politik menjadi suatu hal yang penting karena ketika ini diterapkan serta disebarkan secara baik dan menyeluruh maka hal-hal yang tidak di inginkan sudah dipastikan tidak akan terjadi.
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam etika politik hal ini merupakan salah satu hal penting yang bisa dikatakan suatu aspek kunci dalam etika politik. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia etika politik menekankan bahwa menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak setiap individu merupakan hal yang penting.

Dari penerapan etika politik di Indonesia kita bisa melihat bahwasanya etika politik ini berfungsi sebagai penuntun pertanggungjawaban politik atas dasar prinsip-prinsip moral²⁰.

Di dalam islam sendiri penerapan dan pengembangan etika politik sudah menjadi hal yang sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan perkembangan system pemerintahan dan politik dalam islam²¹. Oleh karena itu penerapan etika politik sangat perlu untuk dilakukan, karena didalam islam itu sendiri yang namanya etika atau moral (akhlak) sudah semestinya di jadikan sebagai suatu hal pokok dalam perpolitikam ataupun dalam pemerintahan itu sendiri²².

Jika kita kaitkan antara etika politik dengan politik hukum maka dari hal ini akan menghasilkan suatu Batasan bagi para penguasa (pemerintah) dalam melakukan kehendaknya. Politik hukum merupakan suatu pernyataan kehendak dari penguasa negara mengenai penerapan hukum yang akan diterapkan di wilayahnya. Yang dimana etika politik ini didalamnya berisi suatu prinsip-prinsip yang bisa dikatakan sangat perlu di terapkan dalam melakukan suatu kehendak, karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalam etika politik, seperti keadilan, pertanggungjawaban, persatuan dan lainsebagainya, ini akan membantu para penguasa jika melkukan kehendaknya tidak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan individu lainnya²³.

Pengembangan doktrin etika politik di Indonesia merupakan suatu hal dan suatu proses yang bisa

¹⁹ Firmansyah P Hartati, 'Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)', JURNAL: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, (2019).

²⁰ Dewi Dahlan, 'ETIKA POLITIK DALAM ISLAM (KONSTRUKSI DAN PERSPEKTIF) POLITICAL ETHICS IN ISLAM (CONSTRUCTION AND PERSPECTIVE)', JURNAL: Menara Ilmu, Vol. 15, No. 01 (2021). h. 45.

²¹ Achmad Farid, 'PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM', JURNAL: Dauliyah, 4.2 (2019).

²² Muhammad Zulifan, 'Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Politik Islam Di Indonesia: Ideologi, Transformasi Dan Prospek Dalam Proses Politik Terkini', Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol. 1, No. 2 (2016), h. 193–195. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPL>.

²³ Muhammad Ainun Najib, 'Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia', JURNAL: Agama Dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 2, (2017). h. 158-174.

dikatakan terus berkembang seiring dengan proses dan perjalanan politik, social dan budaya yang terjadi di Indonesia serta berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ada beberapa hal penting dalam pengembangan doktrin etika politik di Indonesia:

- a. Menjadikan Pancasila sebagai fondasi, Pancasila sebagai dasar negara juga bisa menjadi landasan dari pengembangan doktrin etika politik. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi dan keadilan sosial, nilai-nilai tersebut bisa menjadi pengaruh yang besar terhadap pengembangan doktrin etika politik di Indonesia²⁴.

Di dalam Pancasila ada juga hal yang berkaitan dengan etika politik berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam sila ke lima di dalam pancasila. Etika politik berkeadilan ini di tujukan kepada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga beberapa lembaga negara memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan ini²⁵.

- b. Pendidikan politik, Upaya pengembangan doktrin etika politik bisa juga melalui sarana Pendidikan politik yang di salurkan kepada Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia terutama Lembaga yang erat kaitannya dengan hal-hal politik. Yang Dimana dari saran ini bisa membantu membangun kesadaran akan prinsip-prinsip politik dan tanggung jawab politik.
- c. Kesadaran akan pentingnya moral, ini juga bisa menjadi suatu bentuk pengembangan terhadap doktrin etika politik, karena kesadaran akan pentingnya moral merupakan suatu dasar dalam beretika, yang Dimana setiap individu yang memiliki sangkut paut dengan hal politik moral memainkan peran penting dalam membentuk doktrin etika politik yang berkelanjutan serta memastikan bahwa kekuasaan politik digunakan dan disalurkan untuk kebaikan dan kepentingan bersama.

Dari berbagai pemaparan hal-hal diatas bisa kita simpulkan bahwasanya penerapan dan pengembangan doktrin etika politik di Indonesia merupakan sebuah proses yang penting dan terus berkembang dalam membangun kesadaran terhadap Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dengan menerapkan prinsip etika politik yang adil, demokratis dan bertanggungjawab. Yang secara keseluruhan penerapan dan pengembangan dooktrin etika politik di Indonesia merupakan suatu proses yang Panjang dan kompleks.

4. Peran Lembaga negara dalam menjalankan serta mengimplementasikan etika politik

Lembaga negara memiliki perang yang penting dalam menjalankan serta mengimplementasikan etika politik, karena etika politik merupakan suatu perangkat prinsip moral serta nilai-nilai yang mengatur perilaku politik dan pengambilan keputusan dalam lingkup pemerintahan. Berikut ini ada beberapa peran dari lembaga negara dalam penerapan serta pengimplementasia etika politik:

- a) Pebuatan serta penegakan hukum, dalam hal ini lembaga negara yaitu legislatif dan yudikatif, memiliki tanggungjawab membuat serta merancang undang-undang serta kebijakan yang didalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam etika politik. Dalam hal penegakan hukum setiap individu yang mempunyai hubungan dengan dunia politik yang dimana pada saat-

²⁴ Agus Tinus and Arifudin Prasetyo Wibowo, 'PANDANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI KOTA MALANG', JURNAL: Civic Hukum, Vol. 7, No. 2, (2022) <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22515>.

²⁵ Abdul Hafid, Rustam Pikahulan, and Hasanuddin Hasyim, 'Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila', DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 18.1 (2020), 70–89 <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202>.

saat tertentu mereka melakukan pelanggaran terhadap etika politik maka sudah semestinya mereka diberi sanksi yang sepantasnya²⁶.

- b) Pengawasan dan pemeriksaan, lembaga negara, seperti badan pengawas ataupun ombudsman, mereka memiliki peran yang penting dalam penerapan serta pengimplementasian etika politik, karena lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pengawasan dan pemeriksaan sudah semestinya menerapkan nilai-nilai etika politik terhadap badan atau individunya, ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan lain sebagainya.
- c) Pembentukan kebijakan, kembali lagi kepada lembaga negara yang mempunyai fungsi legislatif, sangat diharapkan agar menerapkan nilai etika politik dalam membentuk dan mengeluarkan suatu kebijakan. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembentukan kebijakan itu senantiasa didasarkan pada pertimbangan etika politik, agar kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai etika (moral), keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Etika politik juga menuntut agar kekuasaan dijalankan berpatokan dengan hukum yang berlaku sehingga dalam menjalankan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, kekuasaan ini disahkan secara demokratis serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Sehingga dalam penerapannya tidak merugikan masyarakat²⁷.

C. Analisis Doktrin Nurcholish Majid

1. Pengaruh Nurcholish Majid (pandangan Nurcholish Majid mempengaruhi doktrin etika politik di Indonesia)

Menurut pandangan Nurcholish Majid etika politik ini merupakan suatu hal yang sudah semestinya diterapkan dalam dunia politik yang ada di Indonesia²⁸. Jika kita melihat pandangan Nurcholish Majid mengenai etika politik beliau memiliki pandangan bahwa dalam etika politik ada tiga prinsip dasar yang perlu untuk diterapkan, yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan. Dari ketiga hal ini lah yang nantinya diharapkan akan memiliki pengaruh besar terhadap penerapan etika politik di Indonesia.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pemikiran Nurcholish Majid salah satunya ialah (demokrasi), Nurcholish Majid mengartikan demokrasi ini sebagai kata kerja yang mengandung makna sebagai suatu proses yang dinamis (mampu bertahan dan menempatkan diri dalam situasi apapun). Oleh karena itu beliau menyarankan agar demokrasi ini harus di upayakan serta di biasakan dalam kehidupan sehari-hari²⁹. Jadi, demokrasi disini bisa diartikan sebagai suatu proses dalam melaksanakan nilai-nilai keadabandalan bernegara dan bermasyarakat serta di harapkan juga ini bisa di implementasikan dalam lingkup Lembaga Negara.

Pengaruh nurcholish majid terhadap doktrin etika politik di Indonesia, ada juga prinsip lain yang terkandung dalam pemikiran beliau, yakni prinsip keadilan, dalam etik politik keadilan bisa kita maknai

²⁶ Mei Susanto, 'The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia (Peran Lembaga Legislatif Dalam Proses Penganggaran Negara Di Indonesia)', JURNAL: Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, (2018).

²⁷ Pahrudin and Hapsa, 'Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya (hubungan etika politik dan kekuasaan)', Jurnal Majelis, Vol. 2, No. 2, (2019), h. 112–116.

²⁸ Nasitotul Janah, 'Nurcholish Majid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)', CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No.1, (2017).

²⁹ Akmal Hawi, 'Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005', JURNAL: Studi Islam, Vol. 15, No. 1 (2019). h. 113-133.

sebagai sesuatu yang penempatannya sesuai dengan proporsi setiap individu³⁰, yang jika kita kaitkan dengan penerapan etika politik akan menjadi suatu hal yang sangat penting, karena ini bisa menjadi acuan kepada para pemerintah ataupun politisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan selalu merujuk pada apa yang telah ditetapkan, yang Dimana jika prinsip ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan etika politik di Indonesia maka bisa dikatakan bahwa kemungkinan sudah tidak terjadi lagi Tindakan sewenang-wenang dari pemerintah maupun instansi atau organ yang ada di dalam-nya.

Dalam pengaruh Nurcholish Majid mengenai etika politik, maka itu juga bisa saja tertuju pada salah satu prinsip yang lain, yaitu prinsip keterbukaan. Keterbukaan yang di maksud disini ialah suatu prinsip yang di dalamnya mengedepankan yang namanya toleransi, saling mengerti antar individu dan antar budaya. Keterbukaan disini juga mencakup kemampuan untuk menerima serta menghormati perbedaan dalam Masyarakat. Jadi jika kita kaitkan dengan doktrin etika politik terhadap Lembaga negara maka, Lembaga negara tersebut sudah semestinya menerapkan prinsip ini terhadap seluruh kegiatannya yang berhubungan dengan politik. Karena dengan prinsip keterbukaan ini maka akan mendorong Lembaga negara agar lebih transparansi dalam melakukan suatu Tindakan dan Keputusan yang mereka keluarkan. Jika kita kaitkan antara pandangan Nurcholish Majid tentang etika politik dengan bagaimana peran etika politik terhadap Lembaga negara seperti dalam Lembaga legislatif, yang Dimana dalam Lembaga ini etika politik berguna untuk menganalisis antara Tindakan individu dan struktur-struktur politik yang ada. Jika kita melihat pandangan nurcholish majid mengenai etika politik yang Dimana pemikiran beliau mengenai hal ini salah satu didalamnya yaitu keterbukaan (transparansi), bisa dikatakan transparansi ini memiliki peran penting dalam hal Tindakan individu, karenadiharapkan agar dalam mengeluarkan Tindakan atau Keputusan maka akan lebih terbuka dan akan lebih berpengaruh terhadap kepentingan umum karena tidak sebatas hanya untuk kepentingan pribadi³¹.

Etika politik ini memiliki peranan yang sangat penting bagi Lembaga negara yang ada di Indonesia, karena etika politik bukan hanya berperan sebagai pengatur keseimbangan dalam pemisahan kekuasaan antara Lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi etika politik ini juga menjadi acuan dasar dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik³².

Sehingga bisa kita lihat bahwa peran daripada etika politik terhadap Lembaga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan Lembaga negara, karena mulai dari bagaimana cara para aparat negara bersikap hingga bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan dan Keputusan publik yang mana apabila sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik maka itu akan berjalan baik dan lancar serta tidak merugikan pihak manapun.

Peranan doktrin terhadap penanaman etika politik terhadap lembaga negara bisa dikatakan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, karena dari penanaman etika politik terhadap lembaga negara maka itu akan mengarahkan seluruh aparat negara yang berkaitan dengan lembaga negara dapat

³⁰ Syamsuddin Abdullah H, 'Pemikiran Kalam Nurcholish Majid Dan Relevansinya Dalam Pemikiran Modern Di Indonesia', Jurnal At-Tadabbur, Vol. 7, 2017.

³¹ Nur Rohim Yunus, 'Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan', JURNAL: Ilmu Syariah, Vol. 2, No. 2, (2014), h. 257-273. www.suaramerdeka.com.

³² P I Funome and W T Hardiyanto, 'Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik', Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 1.No. 2 (2015), h. 9-15.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34%0Ahttps://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34/95>.

menjalankan tugas dan wewenangnya agar lebih mengarah pada prinsip etika politik yaitu demokrasi, keadilan, keterbukaan (transparansi), yang dimana dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan lebih berjalan dengan lancar dan tidak akan mendatangkan pengaruh buruk terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Etika politik merupakan suatu hal yang pada dasarnya memuat berbagai aspek yang berkaitan dengan moral (perilaku baik atau perilaku buruk). Dalam kaitannya dengan politik, etika ini bisa dikatakan memiliki peran penting dalam dunia perpolitikan, karena dengan adanya etika (moral) dalam hal politik maka itu akan membawa atau mengarahkan setiap individu maupun kelompok dalam dunia politik agar senantiasa melakukan tugas dan wewenangnya ke arah yang lebih baik dan tidak menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan juga terhadap masyarakat.

Dalam hal peran daripada doktrin etika politik dalam lembaga negara, ini merupakan hal yang bisa dikatakan memiliki manfaat yang besar terhadap lembaga negara, karena dengan penanaman etika politik dalam suatu lembaga negara, itu akan menjadikan lembaga tersebut bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi itu akan terjadi apabila para pejabat negara yang ada dalam lembaga tersebut benar-benar menerapkan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam etika politik itu sendiri.

Jika dilihat dari keadaan lembaga negara pada saat ini, masih banyak yang belum menerapkan dan mengimplementasikan nilai dan esensi yang terkandung dalam etika politik, sehingga segala tindakan serta keputusan yang mereka keluarkan masih ada yang memberikan dampak yang merugikan masyarakat. Maka dari itu doktrin etika politik ini hadir untuk memberikan pemahaman terhadap lembaga negara agar bisa memberikan penekanan terhadap pejabatnya mengenai pentingnya etika politik ini diterapkan dan diimplementasikan.

Pandangan Nurcholish Majid dalam hal etika politik, beliau berpandangan bahwa yang paling penting dalam etika politik adalah memperhatikan tiga prinsip utama yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan, dari ketiga hal tersebut jika diterapkan dan diimplementasikan dengan baik dan benar maka akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan negara. Ketiga prinsip utama dalam etika politik yang ditawarkan oleh Nurcholish Majid, yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan, hal ini bisa dikembangkan dengan pengkajian lebih mendalam mengenai esensi dari ketiga hal tersebut, yang nantinya bisa memberi dampak yang lebih terhadap lembaga negara dan masyarakat.

Simpulan

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa doktrin etika politik yang ditujukan terhadap Lembaga negara yang ada di Indonesia merupakan suatu aspek yang lumrah untuk diterapkan dalam berbagai aspek yang ada dalam Lembaga negara. Terkait dengan etika politik dari sudut pandang Nurcholish Majid, beliau berpandangan bahwa etika politik itu didalamnya mengandung setidaknya tiga prinsip dasar, yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan (transparansi), yang dengan demikian jika ketiga prinsip tersebut diterapkan dan di implementasikan ke-dalam suatu Lembaga negara maka akan sangat berpengaruh pada segala urusan dalam lembaga negara tersebut, karena pada dasarnya etika politik itu mengandung nilai-nilai moral yang jika di gabungkan dengan prinsip etika politik Nurcholish Majid maka lembaga negara akan lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan yang nantinya akan tertuju ke-masyarakat.

Saran

Prinsip utama dalam etika politik yang ditawarkan oleh Nurcholish Majid, yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan, hal ini bisa dikembangkan dengan pengkajian lebih mendalam mengenai esensi dari ketiga hal tersebut, yang nantinya bisa memberi dampak yang lebih terhadap lembaga negara dan masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Hafid, Rustam Pikahulan, and Hasanuddin Hasyim, 'Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 70-89 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202>>
- Akmal Hawi, 'Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005', *JURNAL:Studi Islam*, 15 (2019)
- Dahlan, Dewi, 'ETIKA POLITIK DALAM ISLAM (KONSTRUKSI DAN PERSFEKTIF) POLITICAL ETHICS IN ISLAM (CONSTRUCTION AND PERSFECTIVE)', *JURNAL: Menara Ilmu*, 15.01 (2021)
- Farid, Achmad, 'PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM', *JURNAL: Dauliyah*, 4.2 (2019)
- Fauzi Sos, S MA, *Politik Islam Perspektif Nurcholish Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam Indonesia*, ed. by S.Sos.MA Fauzi, 1st edn (Kabupaten Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN, 2022)
- Funome, P I, and W T Hardiyanto, 'Peran Etika Poltik Dalam Perumusan Kebijakan Publik', *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, Vol. 1.No. 2 (2015), h. 9-15 <<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34%0Ahttps://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/viewFile/34/95>>
- H, Syamsuddin Abdullah, 'Pemikiran Kalam Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dalam

- Pemikiran Modern Di Indonesia', *Jurnal At-Tadabbur*, 2017
- Hamdani, 'ARTIKULASI POLITIK DAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK (Dalam Perspektif Fiqhu Al-Siyâsah)', *RISALAH HKUM*, 3 (2007), 64
- Handoyo, Eko, MSi Martien Herna Susanti, MSi Moh Aris Munandar, MM Penerbitan kerjasama antara, and Edisi Revisi, *ETIKA POLITIK*, 2nd edn (Semarang: Widya Karya Press, 2016), II
- Hariantati, Runi, 'Etika Politik Dalam Negara Demokrasi', *DEMOKRASI*, Vol. 2 No. 1 (2003)
- Hartati, Firmansyah P, 'Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)', *JURNAL: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 2.No.2 (2019)
- Hasan Hamsah, Marilang, Kurniati, 'Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 14.No. 2 (2021), 122-36
<<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>>
- Janah, Nasitotul, 'Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)', *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, XII.1 (2017)
- Lavan, Yohana Oktaviani, Wulan Siti, Rd Jeni Wiradikusumah, and Khairunnisa Azhari, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA (IMPLEMENTATION OF ISLAMIC VALUES IN INDONESIAN POLITICAL DYNAMICS)', *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 09.01 (2021), 53-66
- M.MUAMAR, 'PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA', 2007
- Maloko, M Thahir, 'ETIKA POLITIK DALAM ISLAM', *Al-Daulah*, Vol. 1 No. 2 (2013)
- Muh. In'amuzzahidin, 'ETIKA POLITIK DALAM ISLAM', *Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2 (2015), 91-94
- Munawar, M, 'Relevansi Dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Indonesia', *JURNAL: Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2019)
- Najib, Muhammad Ainun, 'Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia', *JURNAL: Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6.2 (2017)
- Nur Rohim Yunus, 'Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan', *JURNAL: Ilmu Syariah*, 2.2 (2014)
<www.suaramerdeka.com>
- Pahrudin, and Hapsa, 'Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya', *Jurnal Majelis*, 2.2 (2019), 93-106
- Pujiningsih, Sri, 'Hubungan Antara Hukum Dan Etika Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Membaca Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Sumber Etik)', *Pena Justitia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17.1 (2017), 28-36
- Rosdiana, 'FILOSOFIS PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG HUBUNGAN AGAMA (ISLAM) DAN NEGARA', *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 03 No. 01 (2022) <<https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas>>

- Shobron, Sudarno, 'Konsep Etika Berpolitik Dalam Kitab Sunan Abu Dawud', *JURNAL: Lektur Keagamaan*, 11.1 (2013), 151-80
- Sumpena, Deden, 'PARADIGMA PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4.12 (2008)
- Susanto, Mei, 'The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia (Peran Lembaga Legislatif Dalam Proses Penganggaran Negara Di Indonesia)', *JURNAL: Negara Hukum*, 9.2 (2018)
- Tafsir, Ahmad, *Posisi Nurcholish Madjid Dalam Pembangunan Pemikiran Islam Di Indonesia*, Dalam *Jalaluddin Rahmat*, ed. by Thariqat Nurcholisshy, Cet. I ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar))
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Nurcholish Majid Dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju)
- Tinus, Agus, and Arifudin Prasetyo Wibowo, 'PANDANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI KOTA MALANG', *JURNAL: Civic Hukum*, 7.2 (2022) <<https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22515>>
- Tri Hadi, Rahmad, 'ETIKA POLITIK ARISTOTELES: Kohesivitas Etika Dan Politik', *AL-AQIDAH*, Vol. 13 No (2021)
- Zuliana, Eka, *KONSEP ETIKA POLITIK DALAM PEMAHAMAN AGAMA*
- Zulifan, Muhammad, and Info Artikel Abstrak, 'Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Politik Islam Di Indonesia: Ideologi, Transformasi Dan Prospek Dalam Proses Politik Terkini', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.2 (2016), 171-95 <<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>>